



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Mei 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA : KEDEPUTIAN BIDANG I KEBIJAKAN DAN STRATEGI
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT KEBIJAKAN KAMLA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GUSTI NGURAH AGUNG YULIARTA ENDRAWAN
2. Jabatan : DIREKTUR KEBIJAKAN KAMLA
3. NHK : 143647

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 24.300.000.000

1. Tanah Seluas 1125 m2 di BADUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 22.000.000.000
2. Bangunan Seluas 45 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.500.000.000
3. Bangunan Seluas 36 m2 di KOTA JAKARTA BARAT , HIBAH TANPA AKTA Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 175.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2011, HIBAH TANPA AKTA Rp. 170.000.000
2. MOTOR, KYMCO SEPEDA MOTOR Tahun 2000, HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 45.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.270.191.719

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 26.790.191.719

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 26.790.191.719

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **22 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.